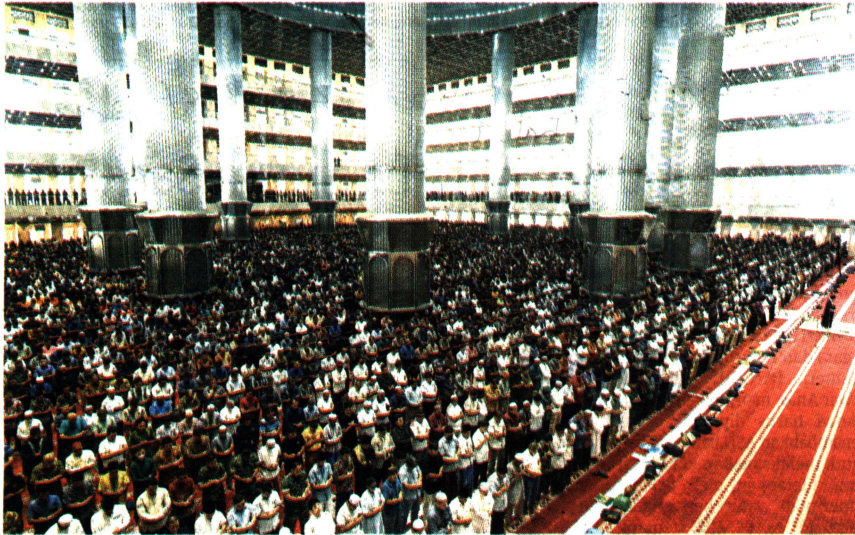




Masjid di DIY Tolak Politik Praktis



Antara/Hafidz Mubarak A

Umat Islam melaksanakan Salat Jumat pertama pada Ramadan 1444 Hijriyah di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (24/3). Ribuan umat Islam melaksanakan Salat Jumat pertama pada Ramadan 1444 H di Masjid Istiqlal dengan khidmat.

JOGJA—Masjid di DIY tegas menolak kegiatan politik praktis di tempat ibadah.

*Ujang Hasanudin, Anisatul Umah,
& Luqas Subarkah
redaksi@harianjogja.com*

- ▶ **Masjid Jogokariyan tidak pernah mengundang tokoh politik.**
- ▶ **Masjid Suciati Saliman hanya menghadirkan penceramah dari kalangan ustaz, baik di tingkat lokal maupun nasional.**

Ramadan tahun ini jatuh di tahun politik menjelang Pemilu 2024, sehingga rawan dimanfaatkan oleh partai politik maupun calon untuk kepentingannya.

Ketua Dewan Syura Takmir Masjid Jogokariyan, Jogja, Ustaz Muhammad Jazir ASP, menyampaikan Masjid Jogokariyan tidak pernah mengundang tokoh politik. Ini sudah menjadi komitmen sejak tahun-tahun sebelumnya. "Kami tidak pernah mengundang tokoh politik," ucapnya, Jumat (24/3).

Ia menegaskan Masjid Jogokariyan tidak akan memberi ruang dan panggung untuk aktivitas politik dan kegiatan politik praktis.

Oleh karena itu untuk mengisi kegiatan selama bulan Ramadan, Masjid Jogokariyan mengundang dai-dai lokal. "Dai-dai lokal Jogokariyan sekaligus untuk kaderisasi. Daya tarik kami di imam salat yang bagus dan *event* pendukung. Buka puasa dengan 3.000 piring per hari, lomba dan lainnya. Bukan "jualan" ustaz," ujarnya.

Masjid di DIY...

Senada disampaikan aktivis Masjid Syuhada, Kotabaru, Jogja, Jihansyah. Ia menyampaikan Masjid Syuhada tidak akan mengundang tokoh-tokoh yang dicalonkan dalam kontestasi politik Pemilu 2024.

Menurutnya Masjid Syuhada menerima semua kalangan dan netral. "Ramadan tahun ini enggak mengundang orang-orang yang dicalonkan, tapi (undangan) yang di birokrasi. Calon bupati atau wakil dan tokoh lain tidak diundang," ujarnya.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY, Machasin menyampaikan terkait dengan upaya pencegahan kegiatan politik di tempat ibadah sepanjang Ramadan MUI tidak sampai ke tahap pengawasan. Namun memberikan imbauan agar tidak berkegiatan politik di tempat ibadah.

"Ini imbauan MUI agar tidak melakukan kampanye yang tidak sehat, tidak membuat perpecahan. (Jika ada laporan) tentu kami akan sampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang," ujarnya.

MUI juga bekerja sama dengan dewan masjid untuk menyampaikan hal ini dan meneruskan ke masjid-masjid. "Kami tidak sampai ke pengawasan kan ada Dewan Masjid Indonesia (DMI), kami hanya mengimbau."

Seleksi Ketat

Ketua Takmir Masjid Suciati Saliman, Muhammad Nur Afandi, menjelaskan tahun ini Masjid Suciati Saliman hanya menghadirkan penceramah dari kalangan ustaz, baik di tingkat lokal maupun nasional.

"Seperti Handy Bony dari Bandung," katanya.

Handy Bony merupakan ustaz yang bergaya seperti anak muda dan dikenal luas melalui sosial media dan Youtube. Kemudian ada pula dokter Probo Suseno, yang selain merupakan dokter di RSUP Dr. Sardjito, juga kerap mengisi mimbar dakwah.

Beberapa pengisi lainnya dihadirkan dari dunia akademisi di seputar Jogja.

Takmir Masjid Suciati Saliman sengaja tidak menghadirkan tokoh politik untuk menghindari konflik kepentingan menjelang tahun pemilu. "Kami sebisa mungkin menghindari tokoh politik di tahun ini," ungkapnya. Meski demikian bukan berarti

Masjid Suciati Saliman tidak pernah mengundang tokoh politik. Ia mengungkapkan sebelumnya pernah mengundang Hilmy Muhammad, dari Pondok Pesantren Krapyak, yang saat ini menjadi anggota DPD RI.

Adapun, Takmir Masjid Agung Manunggal Bantul, Saebani, menyatakan semua penceramah selama Ramadan tahun ini baik penceramah sebelum tarawih maupun kajian setelah subuh sudah diseleksi ketat.

Seleksi penceramah dilakukan supaya isi ceramah tidak bermuatan politik praktis maupun paham yang merusak persatuan umat dan memecah belah bangsa.

"Kami selektif dalam memilih penceramah sejak dulu. Yang boleh mengisi pengajian di Masjid Agung Bantul hanya (dai yang berlatar belakang) NU dan Muhammadiyah," ujarnya.

Saebani mengaku sejauh ini penceramah yang dipilih untuk mengisi pengajian sebelum tarawih, kajian setelah salat subuh, dan kajian menjelang buka puasa adalah penceramah yang pahalannya sama dengan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan NU dan Muhammadiyah.

Alasannya karena hanya NU dan Muhammadiyah yang selama ini dapat menjaga paham agama sekaligus menjaga persatuan dan kesatuan umat.

Saebani tidak menampik banyak penceramah yang meminta untuk mengisi pengajian di Masjid Agung Manunggal Bantul, tetapi tidak diperkenankan.

"Ada yang minta, tapi kami keberatan untuk memenuhi. Pertimbangannya takut merusak (persatuan) umat," ucapnya.

Sejauh yang ia ketahui dari daftar penceramah di Masjid Agung Manunggal Bantul, tidak ada anggota partai. Soal nantinya di antara penceramah akan mencalonkan diri menjadi kontestan dalam Pemilu 2024, Saebani tidak mengetahuinya.

Saat ini tidak ada penceramah yang diundang dakwah di masjid itu, terang-terangan akan mencalonkan diri pada Pemilu 2024.

Tokoh Politik

Ketua Bawaslu DIY, Sutrisnowati, menjelaskan masjid dan tempat ibadah lain dilarang digunakan sebagai

tempat kegiatan kampanye politik. "Di masa kampanye saja dilarang apalagi di bulan suci puasa yang bukan masa kampanye," katanya.

Sutrisnowati menyebut Bawaslu DIY sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengantisipasi kampanye politik di masjid pada Ramadan ini.

"Secara nasional sudah dilakukan koordinasi, termasuk kami di daerah juga untuk tidak menggunakan masjid sebagai tempat kampanye," ujarnya.

Selain dilarang dalam perundang-undangan, jelas Sutrisnowati, penggunaan masjid untuk kampanye juga berisiko menimbulkan gejolak.

"Eskalasi politik di masyarakat memang sudah meningkat tentu hal ini juga perlu diimbangi dengan kesadaran masyarakat sendiri, jangan sampai terjadi perpecahan apalagi benturan di bulan puasa ini. Untuk itu kami imbau masyarakat tidak menyediakan panggung politik di masjid," jelasnya.

Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) DIY, Prof Muhammad, juga telah mengoordinasikan masjid-masjid di wilayahnya agar tidak memberikan panggung kampanye politik.

"Kalau isi mimbar seperti pilihan saya pemilu nanti jelas itu dilarang, tapi kalau tokoh politik memberikan ceramah asal memenuhi kapasitas dan topiknya menyangkut masalah umat, saya kira tidak masalah. Asal tidak kampanye," katanya.

Larangan tokoh politik tidak memberikan ceramah, jelas Muhammad, sulit diterapkan.

"Tokoh politik itu kan pasti punya kapasitas lain, mungkin soal kesehatan, ekonomi, sosial, dan lainnya. Kalau isi ceramahnya (seputar) itu saya kira masih bisa diterima yang penting untuk kemaslahatan umat," jelasnya.

Muhamad menyebut pengurus masjid di Jogja sudah cukup cerdas memilah tokoh masyarakat yang punya kapasitas guna menyampaikan suatu tema.

"Tidak perlu dikhawatirkan ada panggung kampanye di masjid itu kecil kemungkinan karena saya kira para takmir masjid Jogja ini cerdas-cerdas untuk memilah dan memilah," ujarnya. (Triyo Handoko)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005